



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**NOMOR 03 TAHUN 2025**

Tentang  
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SKB HULU  
SUNGAI SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Membaca : a. Surat Permohonan dari sdr (i) Hj. SRI RAHMAWATI, S,Ag Nomor : 800.1.11/064/SPNF - SKB/2025 Perihal Permohonan Izin Operasional PKBM SKB HULU SUNGAI SELATAN.  
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 400.3.5/6734/DISDIKBUD Tanggal 17 Oktober 2025 Perihal Rekomendasi.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan izin operasional.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal;  
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 33), sebagaimana diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 23).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : SKB HULU SUNGAI SELATAN  
Pengelola : Hj. SRI RAHMAWATI, S,Ag  
Jenis Program : KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
Alamat Lembaga : Jl. SKB No. 27 Desa Tibung Raya,  
Kandangan, Hulu Sungai Selatan

**KEDUA** : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. SKB HULU SUNGAI SELATAN yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
2. SKB HULU SUNGAI SELATAN yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan dan memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan;
3. Untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik maka Lembaga PKBM wajib mengikutsertakan warga belajar pada UJIAN NASIONAL dan UJI KOMPETENSI berdasarkan Standar Pendidikan Nasional dan Standar Kompetensi;
4. Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal menyusun kurikulum/rencana pembelajaran dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tujuan program yang diselenggarakan berdasarkan Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
5. Segala bentuk kegiatan lembaga PKBM termasuk sertifikasi dan akreditasi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ada kegiatan yang menyimpang dari peraturan adalah menjadi tanggungjawab pengelola PKBM dan selanjutnya izin operasional ini secara otomatis dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi;
6. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**KETIGA** : Izin Operasional PKBM ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 22 Oktober 2028.

- KEEMPAT** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum masa izin operasional ini berlaku habis.
- KELIMA** : Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak menjadi tanggung jawab pemberi izin.
- KEENAM** : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kandangan, 22 Oktober 2025

**KEPALA DINAS,**



**Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660722 199303 2 006